

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jalan Pangeran Muda No. 230 Telp. (0565) 21004 -21007
SINTANG 78611



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 ini dapat diselesaikan, sebagai upaya melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja tahun 2021, sekaligus sebagai alat umpan balik (*Feedback*) yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan, guna meningkatkan kualitas perencanaan program dimasa mendatang dan disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Tahun 2021 ini merupakan laporan tahun terakhir sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang 2016-2021. Capaian kinerja sampai dengan tahun terakhir, masih belum menggambarkan kinerja yang ideal dan memiliki banyak kekurangan. Menyikapi hal tersebut kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pihak-pihak terkait, sehingga kinerja dan laporan kinerja Sekretariat Daerah menjadi lebih baik pada periode berikutnya. Harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat berguna sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat serta terwujudnya "***clean government dan good governance***".

Sintang, Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH,



Dra. YOSEPHA HASNAH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19630424 198403 2 008



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR BAGAN	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	1
1. Pendahuluan.....	1
2. Susunan Organisasi.....	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
4. Sumber Daya Aparatur.....	5
5. Sumber Daya Keuangan	7
6. Sarana dan Prasarana.....	7
B. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIG ISSUED</i>)	8
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG	9
1. Visi	9
2. Misi	12
3. Tujuan dan Sasaran Strategis	12
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	22
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	26
B. REALISASI ANGGARAN	67
BAB IV : PENUTUP	69
Lampiran 1 : Formulir Pengukuran Kinerja	



RINGKASAN EKSEKUTIF

(Eksekutif Summary)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 melaporkan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang merupakan jabaran terakhir dari Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan RENSTRA Sekretariat Daerah, terdapat 10 sasaran strategis yang harus diwujudkan, dengan hasil pengukuran sebagai berikut :

A. Kategori SANGAT BERHASIL

- 1) Terciptanya undang-undang dan pelayanan bantuan hukum serta dokumentasi hukum melalui penyusunan produk hukum, sosialisasi produk hukum dan pengkajian produk perundang-undangan (87,50);
- 2) Tersusunnya juknis pembinaan dan pelaksanaan operasional bidang perekonomian dan pembangunan untuk kelancaran pembinaan dan proses administrasi bidang perekonomian dan pembangunan (85,00);
- 3) Tersusunnya rumusan kebijakan daerah bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air (92,50);
- 4) Terwujudnya sistem pendokumentasian terpadu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta terwujudnya pelayanan kehumasan dan protokol yang tepat, cepat dan akurat (92,50).
- 5) Terlaksananya pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian yang tertib dan lancar, tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan administrasi dan operasional di lingkungan Sekretariat Daerah (91,25);
- 6) Optimalisasi penyusunan program, rencana kerja anggaran dan pelaporan serta pelayanan administrasi keuangan yang lancar (85,28).



B. Kategori BERHASIL

- 1) Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, penataan daerah/wilayah, peningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintah kecamatan (77,50);
- 2) Terlaksananya pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat dan umat beragama serta terlaksananya pemberian bantuan sosial, pendidikan, kesehatan dan bantuan bidang keagamaan Meningkatkan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (78,75);
- 3) Tersusunnya bahan perumusan kebijakan, pengoorganisasian, strategi, pembinaan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan penyelesaian sengketa lelang di Kabupaten Sintang dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah (76,25);
- 4) Tersusun dan Terselenggaranya kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta kinerja dan reformasi birokrasi (71,79);

LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang tahun 2021 menggambarkan bahwa belum sepenuhnya capaian kinerja masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Namun secara umum RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dapat dilaksanakan secara baik. Sekretariat Daerah telah berupaya memberdayakan segala aspek yang ada dalam mewujudkan visi Kabupaten Sintang **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021”**.



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG	4



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1	Data pegawai ASN di Lingkungan Setda Kabupaten Sintang	7
Tabel I.2	Data Sarana dan Prasarana Setda Kabupaten Sintang	8
Tabel III.1	Indikator Pencapaian Kinerja Setda Tahun 2020	26
Tabel III.2	Indikator Pencapaian Sasaran 1	32
Tabel III.3	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	33
Tabel III.4	Perbandingan Realisasi Kinerja	33
Tabel III.5	Indikator Pencapaian Sasaran 2	35
Tabel III.6	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
Tabel III.7	Perbandingan Realisasi Kinerja	37
Tabel III.8	Indikator Pencapaian Sasaran 3	39
Tabel III.9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
Tabel III.10	Perbandingan Realisasi Kinerja	41
Tabel III.11	Indikator Pencapaian Sasaran 4	42
Tabel III.12	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	43
Tabel III.13	Perbandingan Realisasi Kinerja	43
Tabel III.14	Indikator Pencapaian Sasaran 5	45
Tabel III.15	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
Tabel III.16	Perbandingan Realisasi Kinerja	48
Tabel III.17	Indikator Pencapaian Sasaran 6	50
Tabel III.18	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	50
Tabel III.19	Perbandingan Realisasi Kinerja	51
Tabel III.20	Indikator Pencapaian Sasaran 7	52
Tabel III.21	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	55
Tabel III.22	Perbandingan Realisasi Kinerja	55
Tabel III.23	Indikator Pencapaian Sasaran 8	58



Tabel III.24	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	59
Tabel III.25	Perbandingan Realisasi Kinerja	60
Tabel III.26	Indikator Pencapaian Sasaran 9	61
Tabel III.27	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	62
Tabel III.28	Perbandingan Realisasi Kinerja	63
Tabel III.29	Indikator Pencapaian Sasaran 10	64
Tabel III.30	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	65
Tabel III.31	Perbandingan Realisasi Kinerja	66
Tabel III.32	Realisasi Anggaran Setda 2020	68



BAB 1

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH.

1. Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 disusun berdasarkan Amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP ini sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*Good Governance*) khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang pada umumnya.

Dengan disusunnya LKjIP Sekretariat Daerah ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah untuk menyelenggarakan tugas umum Sekretariat Daerah dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Menjadikan Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya Sekretariat Daerah yang akuntabel sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif dan reponsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.
- c. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur sipil negara Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.



2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Untuk keseragaman nomenklatur sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Atas terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 106 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Adapun susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

1. Unsur pimpinan, adalah Sekretaris Daerah;
2. Unsur pembantu pimpinan adalah Asisten Sekretaris Daerah, terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 3 Bagian yaitu ;
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Administasi Pemerintahan;
 - (b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - (c) Sub Bagian Otonomi Daerah.
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Bina Mental Spritual;
 - (b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - (c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
 - 3) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - (b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
 - (c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

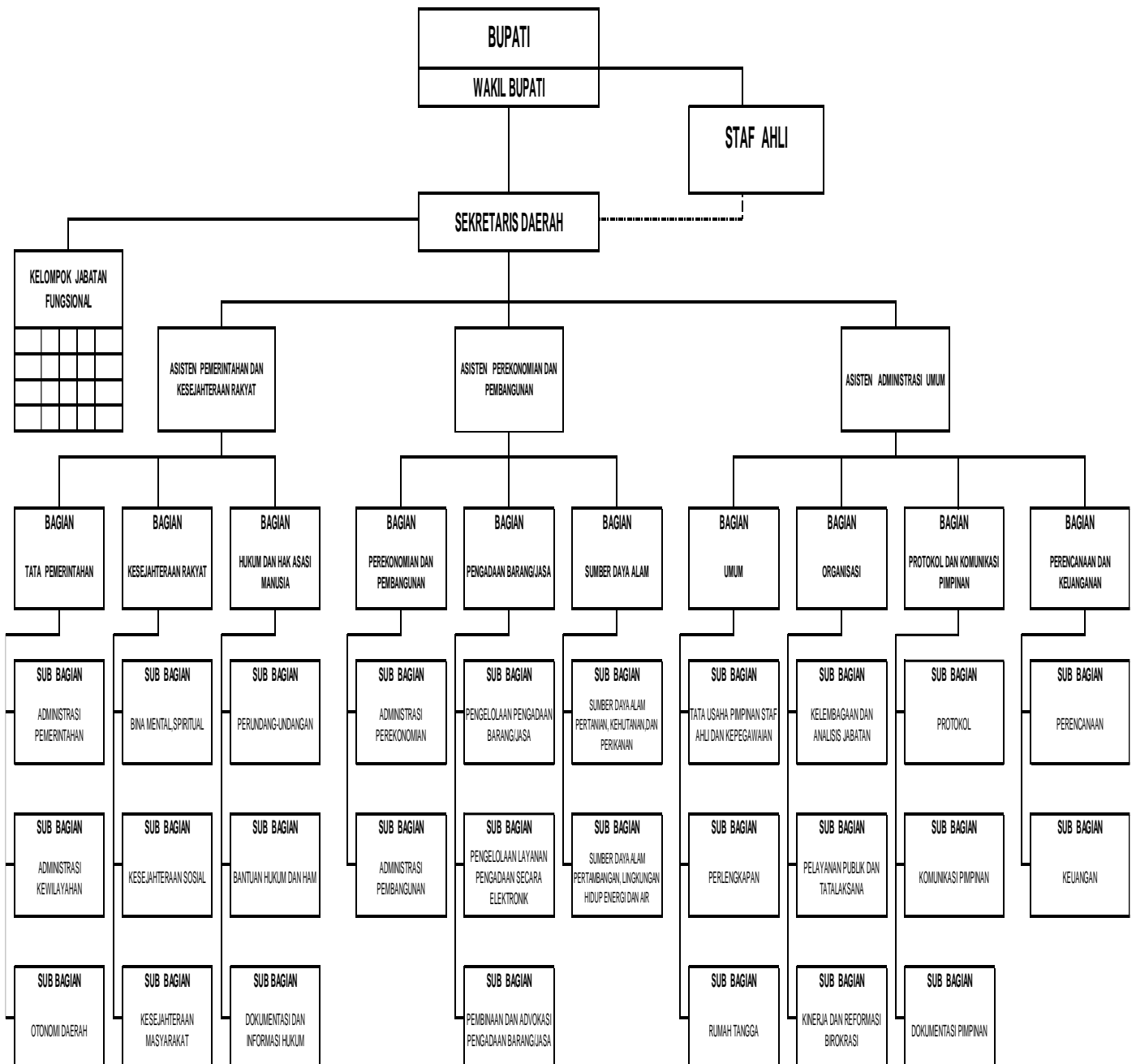


- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan :
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi 3 Bagian yaitu ;
- 1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Administrasi Perekonomian; dan
 - (b) Sub Bagian Administrasi Pembangunan.
 - 2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - (b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - (c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
 - 3) Bagian Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan
 - (b) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan, Lingkungan Hidup, Energi dan Air.
- c. Asisten Administrasi Umum :
- Asisten Administrasi Umum membawahi 4 Bagian yaitu ;
- 1) Bagian Umum, terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - (b) Sub Bagian Perlengkapan; dan
 - (c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 - 2) Bagian Organisasi, terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - (b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - (c) Sub Bagian Kinerja dan Refomasi Birokrasi.
 - 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - (a) Sub Bagian Protokol;
 - (b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - (c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
 - 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Perencanaan; dan
 - (b) Sub Bagian Keuangan.



Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dapat digambarkan sebagai agan berikut :

Bagan 1
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG





3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara dan instansi daerah;
- e. perumusan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum yang menyangkut tugas pemerintahan di daerah dan penyusunan anggaran;
- g. pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga perangkat daerah dengan instansi vertikal;
- h. pembinaan penyelenggaraan pengawasan dan pengembangan Otonomi daerah;
- i. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Sekretariat Daerah;
- j. evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Sekretariat Daerah;
- l. penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan Sekretariat;
- m. pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur merupakan aset utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi, selain metode, money dan sarana/prasarana. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh manusia, karena manusia sebagai sumber daya apartur yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung dengan kinerja yang baik dan tinggi dari aparatur, suatu organisasi akan menjalani kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya. Begitu pula halnya dengan peningkatan



profesionalisme aparatur untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan berkompeten dalam bidang tugasnya.

Keadaan pegawai ASN pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang sampai dengan 31 Desember 2021 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 284 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

1) Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil/Calon PNS) dengan jumlah 133 orang.

a). Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan I	= 2	Orang
Golongan II	= 29	Orang
Golongan III	= 84	Orang
Golongan IV	= 18	Orang

b). Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:

S2	= 32	Orang
S1	= 47	Orang
D4	= 5	Orang
D3	= 5	Orang
D2	= 1	Orang
D1	= 1	Orang
SLTA	= 39	Orang
SLTP	= 1	Orang
SD	= 2	Orang

c). Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

Eselon II	= 3	Orang
Eselon III	= 9	Orang
Eselon IV	= 26	Orang

2) Pegawai Non Organik (Tenaga Honor Rutin) dengan jumlah 151 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tenaga Kontrak Kebersihan	= 58	Orang
Tenaga Harian Lepas Tugas Tertentu	= 33	Orang
Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran dan Pegawai Tidak Tetap	= 60	Orang

3) Staf Ahli Bupati berjumlah = 2 orang.



Tabel. I.1

DATA PEGAWAI APARTUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SETDA KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021

NO	ESELON / NON ESELON	PENDIDIKAN									GOLONGAN			
		S.2	S.1	D.IV	D.III	D.II	D.I	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ESELON II	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
2.	ESELON III	8	1	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
3.	ESELON IV	15	10	-	-	-	-	1	-	-	6	20	-	-
	JUMLAH	26	11	0	0	-	0	1	0	0	18	20	0	0
4.	NON ESELON	6	36	5	5	1	1	38	1	2	0	64	29	2
	JUMLAH	32	47	5	5	1	1	39	1	2	18	84	29	2

5. Sumber Daya Keuangan

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 didukung Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Sintang yang dialokasikan dalam DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang sebesar Rp. 56.832.565.125,00 terdiri dari:

- a. Belanja Operasi sebesar RP. 56.264.101.046,00
- b. Belanja Modal sebesar Rp. 568.465.080,00

6. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai, sarana dan prasarana yang tersedia di Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang adalah sebagaimana tabel I.2 berikut ini :



Tabel I.2

DATA SARANA DAN PRASARANA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Tanah Bangunan	153 buah	Terdiri dari : Hak milik, Hak pakai, Pengolahan
1.	Kendaraan roda enam	2 unit	1 unit Bus rusak berat
2.	Kendaraan roda empat	46 unit	
3.	Kendaraan roda dua	116 unit	
4.	Kendaraan air bermotor	4 unit	
5.	Personal komputer	54 unit	
6.	Lap top	97 unit	
7.	Printer	25 unit	
9.	Proyektor	4 unit	

Sumber data : Sub Bagian Perlengkapan.

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIG ISSUED*)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang mempunyai permasalahan utama (*Strategig Issued*) yaitu :

1. Belum optimalnya pengorganisasian, masih rendahnya penilaian zona integritas, reformasi birokrasi, SAKIP Kabupaten dan SAKIP OPD, dan pelayanan publik. Terhadap masalah tersebut dilakukan penguatan kepada OPD, melalui surat, sosialisasi, maupun rapat koordinasi.
2. Belum optimalnya pelayanan administrasi kepada perangkat daerah, dalam hal waktu proses surat/dokumen yang ditangani di Sekretariat Daerah. Terhadap permasalahan tersebut dilakukan upaya-upaya berupa rapat koordinasi antar Bagian / Asisten, penguatan kepada personil yang menangani tugas dan konsisten terhadap SOP yang di jalankan.
3. Masih rendahnya koordinasi antar Bagian / Asisten yang mengakibatkan kurang cepatnya penanganan masalah kebijakan yang diajukan Organisasi Perangkat Daerah. Terhadap permasalahan tersebut dilakukan penguatan koordinasi internal bagian/asisten baik melalui Medsos (*WhatsApp*) maupun rapat koordinasi antar Asisten/Bagian.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan suatu dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi, Kebijakan dan Program yang akan dicapai. RENSTRA juga berguna sebagai pedoman atau acuan bagi Setda Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku unsur staf, membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi dalam mendukung terlaksananya pemerintahan yang baik (*good governance*).

1. Visi

Sejalan dengan fungsi Setda Kabupaten Sintang selaku unsur staf, membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, dengan demikian Setda Kabupaten Sintang menjalankan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sintang. Selanjutnya baru dijabarkan kedalam misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sesuai RENSTRA Setda Kabupaten Sintang 2016-2021.

Adapun visi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021”

Visi tersebut di atas mempunyai makna :

Cerdas adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, proporsi tenaga



pendidik terhadap siswa dan pengembangan sarana prasarana pendidikan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan (2) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan, (3) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.

Sehat adalah keadaan dimana kondisi masyarakat, baik jasmaniah maupun rohaniah, dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : angka harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada (1) Revitalisasi Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (2) Peningkatan kemitraan *stakeholders* dalam pembangunan kesehatan.

Maju adalah keadaan dimana masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan luas ke depan dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : rasio panjang jalan perjumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan listrik, rasio kesenjangan wilayah, persentase penanganan sampah, persentase penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, persentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGL, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan persentase pertambangan tanpa izin/liar. Masyarakat Kabupaten Sintang yang maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah dan (2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.



Religius adalah keadaan di mana masyarakat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : pemahaman agama pada pemeluk agama, toleransi antar pemeluk agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama. Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat dan (3) pembangunan dan atau rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.

Sejahtera adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil dan merata. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, persentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk dan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, indeks gini, angka kemiskinan, angka pengangguran dan nilai IPM. Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi dan (2) pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergisitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih adalah keadaan di mana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : penetapan APBD tepat waktu, Opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) peningkatan kapasitas SDM aparatur, (2) penggunaan teknologi dan informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan (3) penyederhanaan berbagai peraturan daerah dan (4) reformasi birokrasi di pemerintah daerah.



2. Misi

Guna mewujudkan visi, maka telah dirumuskan misi Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun misi pembangunan Kabupaten Sintang yang terkait langsung dengan tujuan, sasaran, rencana strategis dan kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang adalah misi yang ke 6 yaitu : *“ Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ”*.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, umumnya 1 sampai 5 tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Rumusan tujuan yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang sebagai berikut :



- 1) Meningkatnya pemerintahan yang baik yang didukung oleh sarana dan prasarana fisik yang baik dan memadai.
- 2) Meningkatnya pembinaan di bidang kesejahteraan masyarakat dan umat beragama serta terlaksananya pengadministrasian bantuan sosial, pendidikan, kesehatan dan bantuan bidang keagamaan.
- 3) Meningkatnya koordinasi dengan Instansi terkait dalam hal pelaksanaan, perumusan, dan penelaahan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, dan Keputusan Bupati, melaksanakan pelayanan bantuan hukum dan penyelesaian masalah/ Kasus/ sengketa hukum serta penertiban hukum, dan dokumentasi hukum.
- 4) Meningkatnya kelancaran pelaksanaan operasional bidang perekonomian dan pembangunan yang mantap, profesional, dan akuntabel.
- 5) Meningkatnya pengadaan barang/jasa dan pelayanan yang baik yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
- 6) Tersusunnya kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup energi dan air.
- 7) Meningkatnya pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, tersedianya sarana dan prasarana kerja untuk menunjang perawatan dan pemeliharaan kelengkapan inventaris daerah serta pelayanan administrasi dan operasional.
- 8) Terwujudnya penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.
- 9) Meningkatnya kualitas, kuantitas pelayanan informasi serta menumbuhkembangkan respons dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- 10) Optimalnya penyusunan program, rencana kerja anggaran dan pelaporan serta pelayanan administrasi keuangan yang lancar.

b. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk



memberikan arah pada penyusunan kebijaksanaan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode Renstranya.

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja/instansi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dicapai.

Adapun sasaran strategis yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah selama 5 (lima) Tahun periode 2016–2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan “Meningkatnya pemerintahan yang baik yang didukung oleh sarana dan prasarana fisik yang baik dan memadai” adalah ***Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, penataan daerah/wilayah, peningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintah kecamatan***. Dengan indikator sasaran adalah :
 - a) Tingkat persiapan, kesiapan dan kelayakan pembentukan kecamatan baru.
 - b) Tingkat kejelasan dan kepastian batas daerah Kabupaten Sintang.
 - c) Tingkat kejelasan dan kepastian batas kecamatan.
- 2) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan “Meningkatnya pembinaan di bidang kesejahteraan masyarakat dan umat beragama serta terlaksana pengadministrasian bantuan sosial, pendidikan, kesehatan dan bantuan bidang keagamaan” adalah ***Terlaksananya pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat dan umat beragama serta terlaksananya pemberian bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan bantuan bidang keagamaan***. Dengan indikator sasaran sebagai berikut :
 - a) Tingkat pengetahuan/ketrampilan penerima bantuan dalam penyusunan SPJ.
 - b) Tingkat kelancaran penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten Sintang.



- c) Persentase usaha kesehatan sekolah yang aktif.
 - d) Jumlah bantuan sosial/keagamaan, kesmas, bantuan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat.
 - e) Tingkat kerukunan umat beragama.
 - f) Tingkat ketersediaan data dan informasi penerima bantuan.
 - g) Evaluasi mahasiswa ikatan dinas.
 - h) Tingkat penerimaan bakal calon mahasiswa baru jalur kerjasama dan jalur beasiswa.
- 3) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan “Meningkatnya koordinasi dengan Instansi terkait dalam hal pelaksanaan, perumusan dan penelaahan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, dan Keputusan Bupati, melaksanakan pelayanan bantuan hukum dan penyelesaian masalah/kasus/sengketa hukum serta penertiban hukum, dokumentasi hukum dan pengelolaan perpustakaan Sekretariat Daerah” adalah:
- Terciptanya undang-undang dan pelayanan bantuan hukum serta dokumentasi hukum melalui penyusunan produk hukum, sosialisasi produk hukum dan pengkajian perundang-undangan.*** Dengan indikator sasaran adalah :
- a) Persentase Raperda yang telah diperdakan.
 - b) Tingkat penyelesaian kasus/perkara yang ditangani sampai tuntas.
 - c) Tingkat kelengkapan buku dan peraturan perundang-undangan yang didokumentasikan, dipelihara dan dikelola.
- 4) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan “Meningkatnya kelancaran pelaksanaan operasional bidang perekonomian dan pembangunan yang mantap, profesional dan akuntabel”, adalah ***Tersusunnya juknis pembinaan dan pelaksanaan operasional bidang perekonomian dan pembangunan untuk kelancaran pembinaan dan proses administrasi bidang perekonomian dan pembangunan.*** Dengan indikator sasaran sebagai berikut :
- a) Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan perekonomian.
 - b) Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan pembangunan.



- c) Tingkat pemanfaatan data dan informasi kegiatan perekonomian sebagai bahan evaluasi, acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya.
 - d) Tingkat pemanfaatan data dan informasi kegiatan pembangunan sebagai bahan evaluasi, acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan pembangunan tahun berikutnya.
- 5) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan “ Meningkatnya pengadaan barang/jasa dan pelayanan yang baik yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai ” adalah ***Tersusunnya bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, strategi, pembinaan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pelayanan sengketa lelang di Kabupaten Sintang dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.*** Dengan indikator sasaran sebagai berikut :
- a) Persentase penyebarluasan bahan SOP dan SPM pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat.
 - b) Persentase ketersediaan tenaga ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - c) Persentase pelaksanaan proses pengadaan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 - d) Persentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - e) Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang.
 - f) Persentase unit kerja yang telah melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang.
 - g) Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil lelang pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa.



- h) Rasio pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang.
- 6) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan “Tersusunnya kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air” adalah ***Tersusunnya kebijakan daerah di bidang sumber daya alam, pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air.*** Dengan indikator sasaran sebagai berikut :
- a) Jumlah dokumen profil daerah tentang sumber daya alam.
- b) Jumlah dokumen kebijakan daerah di bidang sumber daya alam.
- 7) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan “Meningkatnya pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, tersedianya sarana dan prasarana kerja untuk menunjang perawatan dan pemeliharaan kelengkapan inventaris daerah serta pelayanan administrasi dan operasional”, ***Terlaksananya pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian yang tertib dan lancar, tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan administrasi dan operasional di lingkungan Sekretariat Daerah.*** Dengan indikator sasaran sebagai berikut :
- a) Tingkat kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor milik pemerintah
- b) Tingkat kelayakan sarana dan prasarana gedung kantor milik pemerintah
- c) Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di setiap bagian di lingkungan Setda.
- d) Tingkat kelayakan sarana dan prasarana bagian di Lingkungan Setda.
- e) Tingkat pemenuhan kebutuhan kantor atas barang dan jasa
- f) Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesejahteraan pegawai
- g) Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan
- h) Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan disiplin
- i) Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan sanksi pelanggaran disiplin.
- j) Indeks kepuasan pegawai terhadap penghargaan dan prestasi kerja.



- k) Tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas pokok Setda dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
 - l) Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 8) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan “Terwujudnya penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi”, adalah ***Tersusunnya dan terselenggaranya kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.*** Dengan indikator sasaran sebagai berikut :
- a) Jumlah Rancangan Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Perbup tentang SOTK perangkat daerah .
 - b) Jumlah analisis jabatan perangkat daerah yang disusun.
 - c) Jumlah standar kompetensi jabatan yang disusun.
 - d) Persentase pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik
 - e) Persentase fasilitasi implementasi ketatalaksanaan.
 - f) Persentase penguatan SAKIP kabupaten
 - g) Persentase pembinaan percepatan reformasi birokrasi.
- 9) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan “Meningkatnya kualitas, kuantitas pelayanan informasi serta menumbuh kembangkan respons dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan” adalah ***Terwujudnya sistem pendokumentasian terpadu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta terwujudnya pelayanan kehumasan dan protokol yang tepat, cepat, dan akurat.*** Dengan indikator sasaran sebagai berikut :
- a) Persentase jumlah informasi dan kegiatan yang diliput/diberitakan.
 - b) Persentase jumlah informasi dan kegiatan pelayanan dan pembangunan yang telah diinformasikan kepada masyarakat.



- 10) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan “Optimalnya penyusunan program, rencana kerja anggaran dan pelaporan serta pelayanan administrasi keuangan yang lancar” adalah ***Optimalisasi penyusunan program, rencana kerja anggaran dan pelaporan serta pelayanan administrasi keuangan yang lancar***. Dengan indikator sasaran adalah :
- a) Jumlah laporan keuangan Setda yang disusun.
 - b) Jumlah dokumen rencana kerja Setda.
 - c) Jumlah laporan pencapaian kinerja dan anggaran Setda.
 - d) Jumlah laporan semesteran dan realisasi anggaran Setda.
 - e) Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran Setda.
 - f) Jumlah laporan keuangan akhir tahun Setda.
 - g) Tersusunnya dokumen anggaran Setda.
 - h) Tersusunnya dokumen rencana startegis Setda
 - i) Jumlah Surat Keputusan pendukung.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Adapun strategi yang ditetapkan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang untuk Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan koordinasi bidang pemerintahan.
2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan koordinasi bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan.
3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan koordinasi bidang Hukum dan HAM.
4. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan koordinasi bidang Perekonomian dan Pembangunan.
5. Meningkatkan efektivitas kebijakan pengkoordinasian, strategi pembinaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan penyelesaian sengketa lelang barang/jasa pemerintah.
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya alam dan pengembangan potensi daerah.
7. Meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi kepegawaian yang tertib dan lancar tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan administrasi dan operasional.



8. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan dan penyelenggaraan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.
9. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan bidang kehumasan dan protokol.
10. Meningkatkan pelayanan administrasi keuangan yang lancar, efisien dan efektif.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menjadi pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran.

Adapun kebijakan yang ditetapkan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang untuk Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan sasaran "Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, penataan daerah/wilayah, peningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintah kecamatan", ditetapkan kebijakan sebagai berikut: ***Memfasilitasi dan mengkoordinir berbagai kegiatan instansi terkait dalam rangka melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memfasilitasi dan mengkoordinir berbagai instansi terkait dalam rangka melaksanakan kebijakan di bidang administrasi.***
2. Untuk melaksanakan sasaran "Terlaksananya pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat dan umat beragama serta terlaksananya pemberian bantuan sosial, pendidikan, kesehatan dan bantuan bidang keagamaan" ditetapkan kebijakan sebagai berikut: ***Memfasilitasi dan mengkoordinir berbagai kegiatan instansi terkait dalam rangka melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan masyarakat dan umat beragama serta terlaksananya pemberian bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan bantuan bidang keagamaan.***
3. Untuk melaksanakan sasaran "Terciptanya undang-undang dan pelayanan bantuan hukum serta dokumentasi hukum melalui penyusunan produk hukum, sosialisasi produk hukum dan pengkajian perundang-undangan", ditetapkan kebijakan sebagai berikut: ***Pembinaan, Penataan, Perumusan, Penelaahan Peraturan Perundang-undangan, Dokumentasi Hukum dan Bantuan Hukum.***



4. Untuk melaksanakan sasaran "Tersusunnya juknis pembinaan dan pelaksanaan operasional bidang perekonomian dan pembangunan untuk kelancaran pembinaan dan proses administrasi bidang perekonomian dan pembangunan", ditetapkan kebijakan sebagai berikut: ***Mengkoordinir dan memfasilitasi berbagai kegiatan administratif dalam rangka menyusun kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan.***
5. Untuk melaksanakan sasaran "Tersusunnya bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, strategi, pembinaan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pelayanan sengketa lelang di Kabupaten Sintang dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah" Ditetapkan kebijakan sebagai berikut: ***Memfasilitasi dan mengkoordinir kebijakan pengadaan barang/jasa dan penyelesaian sengketa lelang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.***
6. Untuk melaksanakan sasaran "Tersusunnya perumusan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air" ditetapkan kebijakan sebagai berikut: ***Memfasilitasi dan mengkoordinir kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air.***
7. Untuk melaksanakan sasaran "Terlaksananya pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian yang tertib dan lancar, tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan administrasi dan operasional di lingkungan Sekretariat Daerah", ditetapkan kebijakan sebagai berikut: ***Memfasilitasi dan mengkoordinir kegiatan dalam rangka urusan perawatan dan rumah tangga, ketatausahaan, kepegawaian serta pelayanan administrasi dan operasional.***
8. Untuk melaksanakan sasaran "Tersusunnya dan terselenggaranya kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi", ditetapkan kebijakan sebagai berikut: ***Mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan administratif dalam penyusunan dan penyelenggaraan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.***



9. Untuk melaksanakan sasaran "Terwujudnya sistem pendokumentasian terpadu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta terwujudnya pelayanan kehumasan dan protokol yang tepat, cepat dan akurat", ditetapkan kebijakan sebagai berikut: **Memfasilitasi dan mengkoordinir berbagai kegiatan unit kerja/instansi di bidang kehumasan dan keprotokolan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.**
10. Untuk melaksanakan sasaran "Optimalisasi penyusunan program, rencana kerja anggaran dan pelaporan serta pelayanan administrasi keuangan yang lancar.", ditetapkan kebijakan sebagai berikut: **Mengkoordinir dan memfasilitasi program, rencana kerja anggaran dan pelaporan serta pelayanan administrasi keuangan yang lancar, efisien dan efektif di lingkungan Setda.**

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, selanjutnya disepakati ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang memuat program yang akan dilaksanakan dalam periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Adapun sasaran, indikator dan targetnya yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah, Penataan daerah/wilayah, peningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintah kecamatan.	<ul style="list-style-type: none">• Tingkat persiapan, kesiapan dan kelayakan pembentukan Kecamatan baru• Tingkat kejelasan dan kepastian batas daerah Kabupaten Sintang• Tingkat Kejelasan dan kepastian batas kecamatan	95% 80% 85%
2.	Terlaksananya pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat dan umat beragama serta terlaksananya pemberian bantuan sosial, pendidikan, kesehatan dan bantuan bidang keagamaan.	<ul style="list-style-type: none">• Tingkat pengetahuan keterampilan penerima bantuan dalam penyusunan SPJ• Tingkat kelancaran penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten Sintang• Persentase usaha kerjasama sekolah yang aktif• Jumlah bantuan sosial/keagamaan, kesmas, bantuan kerjasama yang diberikan kepada masyarakat• Tingkat kerukunan umat beragama	100% 100% 100% 100% 100%



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none">• Tingkat ketersediaan data dan informasi penerima bantuan• Evaluasi mahasiswa ikatan dinas• Tingkat penerimaan bakal calon mahasiswa baru jalur kerjasama dan jalur beasiswa	100% 100% 100%
3	Terciptanya undang-undang dan pelayanan bantuan hukum serta dokumentasi hukum melalui penyusunan produk hukum, sosialisasi produk hukum dan pengkajian perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none">• Persentase Raperda yang telah di Perdakan• Tingkat Penyelesaian kasus/perkara yang ditangani sampai tuntas• Tingkat kelengkapan buku dan peraturan perundang-undangan yang didokumentasikan, dipelihara, dan dikelola	100% 100% 100%
4	Tersusunnya Juknis pembinaan dan pelaksanaan operasional bidang perekonomian dan pembangunan untuk kelancaran pembinaan dan proses administrasi bidang perekonomian dan pembangunan	<ul style="list-style-type: none">• Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan perekonomian• Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan pembangunan• Tingkat pemanfaatan data dan informasi kegiatan perekonomian sebagai bahan evaluasi, acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya• Tingkat pemanfaatan data dan informasi kegiatan pembangunan sebagai bahan evaluasi, acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan pembangunan tahun berikutnya	100% 100% 100% 100%
5	Tersusunnya bahan perumusan kebijakan, pengoorganisasi, strategi, pembinaan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan penyelesaian sengekata lelang di Kabupaten Sintang dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah	<ul style="list-style-type: none">• Persentase penyebarluasan bahanm SOP dan SPM pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat• Persentase ketersediaan tenaga ahli pengadaan barang /jasa pemerintah• Persentase pelaksanaan proses pengadaan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan• Persentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengadaan banrang/jasa pemerintah.• Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang• Persentase unit kerja yang telah melaksanakan monitoring dan evaluasi	80% 80% 80% 80% 80% 90%



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
		hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang. <ul style="list-style-type: none">Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil lelang pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa.Rasio pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang	1 dok 90%
6	Tersusunnya perumusan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air.	<ul style="list-style-type: none">Jumlah dokumen profil daerah tentang sumber daya alamJumlah dokumen kebijakan daerah di bidang sumber daya alam	1 dok 1 dok
7	Terlaksananya pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian yang tertib dan lancar, tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan administrasi dan operasional di lingkungan Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none">Tingkat kelayakan sarana dan prasarana gedung kantor milik pemerintah.Tingkat kelayakan sarana dan prasarana Bagian di Lingkungan Sekretariat DaerahTingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di setiap bagian di lingkungan SetdaIndeks kepuasan pegawai terhadap penerapan disiplinIndeks kepuasan pegawai terhadap penerapan sanksi pelanggaran disiplinTingkat kesesuaian pelaksanaan tugas pokok Setda dengan perencanaan dan ketentuan yang berlakuIndeks kepuasan pegawai terhadap penghargaan dan prestasi kerjaTingkat kepuasan pelayanan kedinasan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100% 100% 100% 100% 100% 100%
8	Tersusunnya dan terselenggaranya kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik, dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi.	<ul style="list-style-type: none">Jumlah rancangan Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Perbup tentang SOTK Perangkat DaerahJumlah analisis jabatan perangkat Daerah yang disusun	2 dok 1 dok



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none">• Jumlah standar kompetensi jabatan yang disusun• Persentase pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik• Persentase fasilitasi implementasi ketatalaksanaan• Persentase Penguatan SAKIP• Persentase pembinaan percepatan reformasi birokrasi	1 dok 95% 85% 100% 100%
9	Terwujudnya sistem pendokumentasian terpadu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta terwujudnya pelayanan kehumasan dan protokol yang tepat, cepat dan akurat.	<ul style="list-style-type: none">• Persentase jumlah informasi atau kegiatan yang seharusnya diliput atau diberitakan.• Persentase jumlah informasi dan kegiatan pelayanan dan pembangunan yang telah diinformasikan kepada masyarakat	98% 95%
10	Optimalisasi penyusunan program, rencana kerja anggaran dan pelaporan serta pelayanan administrasi keuangan yang lancar	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah laporan keuangan Sekretariat Daerah yang disusun• Jumlah dokumen rencana kerja Sekretariat Daerah• Jumlah laporan pencapaian kinerja dan anggaran Sekretariat Daerah• Jumlah laporan sementara dan realisasi anggaran Setda.• Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran Setda.• Jumlah laporan keuangan akhir tahun Setda.• Tersusunnya dokumen anggaran Setda.• Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2017-2021.• Jumlah Surat Keputusan Pendukung.	100% 1 dok 100% 100% 2 dok 2 dok 1 dok 1 dok 2 dok



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang tahun 2021 diukur sesuai dengan mekanisme perhitungan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil perhitungan capaian kinerja serta analisisnya diuraikan sebagai berikut:

1. Pengukuran Pencapaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran indikator kinerja utama sesuai dengan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
Indikator Pencapaian Kinerja Setda Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)	Capaian Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, penataan daerah/wilayah, peningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintah kecamatan	1. Tingkat persiapan dan kesiapan dan kelayakan pembentukan kecamatan baru	%	95	70	73,68	77,50
		2. Tingkat kejelasan dan kepastian batas daerah Kabupaten Sintang	%	80	60	75,00	77,50
		3. Tingkat kejelasan dan kepastian batas kecamatan	%	85	70	82,35	77,50
Capaian Kinerja Sasaran "BERHASIL"						77,01	77,50
2.	Terlaksananya pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat dan umat beragama serta terlaksananya pemberian bantuan sosial, pendidikan, kesehatan dan bantuan bidang keagamaan	1. Tingkat pengetahuan ketrampilan penerimaan bantuan dalam penyusunan SPJ	%	100	90	90	92,50
		2. Tingkat kelancaran penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten Sintang	%	100	0	0	27,50
		3. Persentase usaha kesehatan sekolah yang aktif	%	100	100	100	92,50
		4. Jumlah bantuan sosial/keagamaan, kesmas, bantuan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat.	%	100	80	80	77,50



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)	Capaian Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Tingkat kerukunan umat beragama	%	100	100	100	92,50
		6. Tingkat ketersediaan data dan informasi penerima bantuan	%	100	90	90	92,50
		7. Evaluasi mahasiswa ikatan dinas	%	100	80	80	77,50
		8. Tingkat penerimaan bakal calon mahasiswa baru jalur kerjasama dan jalur beasiswa.	%	100	80	80	77,50
Capaian Kinerja Sasaran " BERHASIL "						77,50	78,75
3.	Terciptanya undang-undang dan pelayanan bantuan hukum serta dokumentasi hukum melalui penyusunan produk hukum, sosialisasi produk hukum dan pengkajian perundang-undangan	1. Prosentase Raperda yang telah di Perdakan	%	100	100	100	92,50
		2. Tingkat penyelesaian kasus/ perkara yang ditangani sampai tuntas	%	100	100	100	92,50
		3. Tingkat kelengkapan buku dan peraturan perundang-undangan yang didokumentasikan, dipelihara dan dikelola.	%	100	80	80	77,50
Capaian Kinerja Sasaran " SANGAT BERHASIL "						93,33	87,50
4.	Tersusunnya juknis pembinaan dan pelaksanaan operasional bidang perekonomian dan pembangunan untuk kelancaran pembinaan dan proses administrasi bidang perekonomian dan pembangunan	1. Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan perekonomian	%	100	100	100	92,50
		2. Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan pembangunan	%	100	100	100	92,50
		3. Tingkat pemanfaatan data dan hasil-hasil perekonomian sebagai bahan evaluasi acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya	%	100	85	85	77,50
		4. Tingkat pemanfaatan data dan hasil-hasil pembangunan sebagai bahan evaluasi acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya	%	100	85	85	77,50
Capaian Kinerja Sasaran 'SANGAT BERHASIL'						92,50	85,00



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)	Capaian Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Tersusunnya bahan perumusan kebijakan, pengoorganisasi, strategi, pembinaan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan penyelesaian sengketa lelang di kabupaten sintang dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah	1. Persentase penyebarluasan bahan SOP dan SPM pengadaan barang / Jasa pemerintah kepada masyarakat. 2. Persentase ketersediaan tenaga ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. 3. Persentase pelaksanaan proses pengadaan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan. 4. Persentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. 5. Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang. 6. Persentase unit kerja yang telah melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang / jasa pemerintah, pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang. 7. Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil lelang pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitas penyelesaian sengketa. 8. Rasio pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitas penyelesaian sengketa lelang.	% % % % % % dok %	80 80 80 80 90 90 1 90	100 30 80 0 90 90 1 90	125,00 37,50 100 0,00 100 100 100 100	92,50 27,50 92,50 27,50 92,50 92,50 92,50 92,50
Capaian Kinerja Sasaran "BERHASIL"						82,81	76,25



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)	Capaian Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Tersusunnya rumusan kebijakan daerah bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air.	1. Jumlah dokumen profil daerah tentang sumber daya alam 2. Jumlah dokumen kebijakan daerah di bidang sumber daya alam	dok dok	1 1	1 1	100 100	92,50 92,50
Capaian Kinerja Sasaran "SANGAT BERHASIL"						100	92,50
7.	Terlaksananya pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian yang tertib dan lancar, tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan administrasi dan operasional di lingkungan Sekretariat Daerah.	1. Tingkat kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor milik pemerintah. 2. Tingkat kelayakan sarana dan prasarana gedung kantor milik pemerintah 3. Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana disetiap Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Sintang. 4. Tingkat kelayakan sarana dan prasarana bagian di lingkungan Setda Kabupaten Sintang 5. Tingkat pemenuhan kebutuhan kantor atas barang dan jasa 6. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesejahteraan pegawai 7. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan 8. Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan disiplin. 9. Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan sanksi pelanggaran disiplin pegawai 10. Indeks kepuasan pegawai terhadap penghargaan dan prestasi kerja 11. Tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas pokok Setda dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.	% % % % % % % % % %	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	95 90 90 90 90 90 95 90 90 80 95	95 90 90 90 90 90 95 90 90 80 95	92,50 92,50 92,50 92,50 92,50 92,50 92,50 92,50 92,50 77,50 92,50



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)	Capaian Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5	6	7	8
		12. Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan terhadap Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.	%	100	95	95	92,50
Capaian Kinerja Sasaran "SANGAT BERHASIL"						90,83	91,25
8.	Tersusun dan Terselenggaranya kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.	1. Jumlah rancangan Perda dan Perbup SOP dan SOTK. 2. Jumlah analisis jabatan perangkat daerah yang disusun. 3. Jumlah standar kompetensi jabatan yang disusun. 4. Persentase pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik 5. Persentase fasilitasi implementasi ketatalaksanaan. 6. Persentase penguatan Sakip. 7. Persentase pembinaan percepatan reformasi birokrasi	dok dok dok % % % %	2 1 1 95 85 100 100	2 0 0 90 85 90 80	100 0 0 94,74 100 90 80	92,50 27,50 27,50 92,50 92,50 92,50 77,50
Capaian Kinerja Sasaran " CUKUP BERHASIL"						66,39	71,79
9.	Terwujudnya sistem pendokumentasian terpadu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta terwujudnya pelayanan kehumasan dan protokol yang tepat, cepat dan akurat.	1. Persentase jumlah informasi atau kegiatan yang seharusnya diliput atau diberitakan 2. Persentase jumlah informasi dan kegiatan pelayanan dan pembangunan yang telah diinformasikan kepada masyarakat	% %	98 95	90 90	92 95	92,50 92,50
Capaian Kinerja Sasaran "SANGAT BERHASIL"						93,29	92,50



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)	Capaian Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Optimalisasi penyusunan program, rencana kerja anggaran dan pelaporan serta pelayanan administrasi keuangan yang lancar.	1. Jumlah laporan keuangan Sekretariat Daerah yang disusun. 2. Jumlah dokumen rencana kinerja dan anggaran Sekretariat Daerah. 3. Jumlah laporan pencapaian kinerja dan anggaran Sekretariat Daerah. 4. Jumlah laporan semesteran dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah. 5. Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran Sekretariat Daerah. 6. Jumlah laporan keuangan akhir tahun Sekretariat Daerah. 7. Tersusunnya dokumen anggaran Sekretariat Daerah. 8. Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2017-2021 9. Jumlah Surat Keputusan Pendukung	% dok % % dok dok dok dok dok	100 1 100 100 2 2 1 1 2	100 1 100 100 1 2 1 1 2	100 100 100 100 50 100 100 100 100	92,50 92,50 92,50 92,50 27,50 92,50 92,50 92,50 92,50
Capaian Kinerja Sasaran " SANGAT BERHASIL "						94,44	85,28

Kesimpulan dari hasil pengukuran terhadap 10 (sepuluh) sasaran strategis sebagaimana tabel di atas yaitu :

- Sangat Berhasil = 6 sasaran
- Berhasil = 4 sasaran
- Tidak berhasil = 0 (tidak ada)



2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran : 1 **Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan, Penataan Daerah/Wilayah, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Fisik Pemerintah Kecamatan**

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel III.2

Indikator Pencapaian Sasaran 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, penataan daerah/wilayah, peningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintah kecamatan	1. Tingkat persiapan dan kesiapan dan kelayakan pembentukan kecamatan baru 2. Tingkat kejelasan dan kepastian batas daerah Kabupaten Sintang 3. Tingkat kejelasan dan kepastian batas kecamatan	% % %	95 80 85	70 60 70	73,68 77,50 77,50
Capaian Kinerja Sasaran "BERHASIL"						77,50

- 1) Tingkat persiapan dan kesiapan dan kelayakan pembentukan kecamatan baru
Capaian indikator tingkat persiapan dan kesiapan dan kelayakan pembentukan kecamatan baru sebesar 73,68%, dapat dikategorikan **berhasil**. Tingkat persiapan dan kesiapan dan kelayakan pembentukan kecamatan baru masih dihadapkan dengan batas wilayah serta kebijakan pemerintah provinsi.
- 2) Tingkat kejelasan dan kepastian batas daerah Kabupaten Sintang
Capaian indikator kinerja kejelasan dan kepastian tapal batas daerah Kabupaten Sintang sebesar 77,50% dapat dikategorikan **Berhasil**. Indikator kinerja kejelasan dan kepastian tapal batas wilayah administrasi pemerintah mempertegas cakupan wilayah administrasi



yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, agar terwujud pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

3) Tingkat kejelasan dan kepastian batas kecamatan

Capaian indikator kinerja tingkat kejelasan dan kepastian batas kecamatan sebesar 77,50%, dapat dikategorikan "**Berhasil**". Dalam pelaksanaannya tingkat penetapan batas kecamatan semakin ditingkatkan sehingga kelangsungan proses administrasi kewilayahan masyarakat semakin jelas.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III. 3
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
1.	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, penataan daerah/wilayah, peningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintah kecamatan	1. Administrasi Tata Pemerintahan	955.543.000,00	678.460.999,00	71,00		
Rata-rata					71,00	77,50	

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 71,00% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 77,50%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya **belum efisien**.

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Kondisi Realisasi Tahun 2020 dan Target Akhir Tahun 2021

Tabel III.4
Perbandingan Realisasi Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021
1	2	3		4	6	6	7
1	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, penataan daerah/wilayah, peningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintah kecamatan	1	Tingkat persiapan dan kesiapan dan kelayakan pembentukan kecamatan baru	%	50	70	95
		2	Tingkat kejelasan dan kepastian batas daerah Kabupaten Sintang	%	60	60	80
		3	Tingkat kejelasan dan kepastian batas kecamatan	%	65	70	85



4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Hambatan Serta Pemecahan Masalah

- a) Hambatan atau penurunan pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:
1. Terdapat tarik menarik kepentingan dalam kelompok masyarakat yang berbatasan karena dipengaruhi sumber daya alam yang potensial.
 2. Terbatasnya keterangan pada peta maupun tanda batas sebelumnya, baik itu antar Kecamatan, kabupaten maupun antar provinsi lainnya
 3. Terbatasnya tenaga teknis pemetaan.
 4. Kebijakan pemekaran kecamatan masih terhambat akibat regulasi dan penganggaran atau kemampuan keuangan daerah.
- b) Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala:
- 1) Untuk mewujudkan batas wilayah administrasi yang jelas dan pasti, baik dari aspek yuridis maupun fisik dilapangan perlu diambil langkah-langkah penyelesaian tapal batas wilayah pemerintah terendah dimulai dari desa/kelurahan, yang merupakan dasar yang menentukan batas wilayah kecamatan, batas wilayah kabupaten/kota, batas provinsi dan batas wilayah negara.
 - 2) Mengoptimalkan sumber daya yang ada.
 - 3) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk tugas lapangan.
 - 4) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sehingga pemekaran kecamatan di Kabupaten Sintang dapat segera dilaksanakan.



Sasaran : 2

Terlaksananya Pembinaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Umat Beragama Serta Terlaksananya Pemberian Bantuan Sosial, Pendidikan, Kesehatan dan Bantuan Bidang Keagamaan

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel III. 5

Indikator Pencapaian Sasaran 2

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5	6	7
2.	Terlaksananya pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat dan umat beragama serta terlaksananya pemberian bantuan sosial, pendidikan, kesehatan dan bantuan bidang keagamaan	1. Tingkat pengetahuan ketrampilan penerimaan bantuan dalam penyusunan SPJ 2. Tingkat kelancaran penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten Sintang 3. Persentase usaha kesehatan sekolah yang aktif 4. Jumlah bantuan sosial/keagamaan, kesmas, bantuan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat. 5. Tingkat kerukunan umat beragama 6. Tingkat ketersediaan data dan informasi penerima bantuan 7. Evaluasi mahasiswa ikatan dinas 8. Tingkat penerimaan bakal calon mahasiswa baru jalur kerjasama dan jalur beasiswa.	% % % % % % % %	100 100 100 100 100 100 100 100	90 0 100 80 100 90 80 80	90 0 100 80 100 90 80 80
Capaian Kinerja Sasaran " BERHASIL"						78,75



- 1) Tingkat pengetahuan ketrampilan penerimaan bantuan dalam penyusunan SPJ
Capaian indikator kinerja tingkat pengetahuan ketrampilan penerimaan bantuan dalam penyusunan SPJ sebesar 90% dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 2) Tingkat kelancaran penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten Sintang
Capaian indikator kinerja tingkat kelancaran penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten Sintang sebesar 0% dapat dikategorikan **tidak berhasil**.
- 3) Persentase usaha kesehatan sekolah yang aktif
Capaian indikator kinerja persentase usaha kesehatan sekolah yang aktif sebesar 100% dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 4) Jumlah bantuan sosial/keagamaan, kesmas, bantuan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat
Capaian indikator kinerja jumlah bantuan sosial/keagamaan, kesmas, bantuan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat sebesar 80% dapat dikategorikan **berhasil**.
- 5) Tingkat kerukunan umat beragama
Capaian indikator kinerja tingkat kerukunan umat beragama sebesar 100% dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 6) Tingkat ketersediaan data dan informasi penerima bantuan
Capaian indikator kinerja tingkat ketersediaan data dan informasi penerima bantuan sebesar 90% dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 7) Evaluasi mahasiswa ikatan dinas
Capaian indikator kinerja evaluasi mahasiswa ikatan dinas sebesar 80% dapat dikategorikan **berhasil**.
- 8) Tingkat penerimaan bakal calon mahasiswa baru jalur kerjasama dan jalur beasiswa
Capaian indikator kinerja tingkat penerimaan bakal calon mahasiswa baru jalur kerjasama dan jalur beasiswa sebesar 80% dapat dikategorikan **berhasil**.



2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III. 6

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%		
2.	Terlaksananya pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat dan umat beragama serta terlaksananya pemberian bantuan sosial, pendidikan, kesehatan dan bantuan bidang keagamaan	1. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	22.104.438.860,-	21.314.971.283,-	96,42		
		Rata-rata			96,42	78,75	

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 96,42% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 78,75%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya **belum efisien**.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan realisasi tahun 2020 dan target akhir 2021

Tabel III. 7

Perbandingan Realisasi Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	
1	2	3	4	6	6	7	
2.	Terlaksananya pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat dan umat beragama serta terlaksananya pemberian bantuan sosial, pendidikan, kesehatan dan bantuan bidang keagamaan	1	Tingkat pengetahuan ketrampilan penerimaan bantuan dalam penyusunan SPJ	%	90	90	100
		2	Tingkat kelancaran penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten Sintang	%	0	0	100
		3	Persentase usaha kesehatan sekolah yang aktif	%	100	100	100



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021
		4 Jumlah bantuan sosial/keagamaan , kesmas, bantuan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat	%	100	80	100
		5 Tingkat kerukunan umat beragama	%	100	100	100
		6 Tingkat ketersediaan data dan informasi penerima bantuan	%	100	90	100
		7 Evaluasi mahasiswa ikatan dinas	%	100	80	100
		8 Tingkat penerimaan bakal calon mahasiswa baru jalur kerjasama dan jalur beasiswa	%	100	80	100

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Hambatan serta pemecahan masalah

a. Kendala dan hambatan dalam mencapai sasaran

- 1) Sehubungan dengan wabah Covid 19 dimulai pada awal tahun 2020, maka banyak kegiatan yang sudah direncanakan namun tidak dapat dilaksanakan seperti pendampingan/pengurusan jemaah haji.
- 2) Terjadinya pengurangan anggaran pada saat kegiatan sedang dan akan dilaksanakan.
- 3) Belum terkoordinir secara maksimal lembaga, ormas-ormas keagamaan di Kabupaten Sintang.
- 4) Masih adanya penerima hibah yang belum mengerti membuat laporan pertanggungjawaban pengguna dana hibah.
- 5) Koordinasi Tim UKS belum berjalan dengan baik, serta kurangnya respon dan pemahaman pihak sekolah dalam melaksanakan dan mendukung kegiatan UKS.
- 6) Kurangnya informasi dari pihak UNTAN mengenai laporan perkembangan mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan.

b. Upaya yang perlu dilakukan adalah:

- 1) Peningkatan pemberian pemahaman membuat laporan.



- 2) Mengintensifkan koordinasi dengan panitia penerimaan mahasiswa Perguruan Tinggi yang melaksanakan Program kerjasama.
- 3) Mengintensif Koordinasi serta meningkatkan pemahaman dan motivasi sekolah mengenai program UKS.
- 4) Menyarankan kepada pihak UNTAN untuk melakukan pertemuan secara berkala dengan Pemkab/Pemkot selaku penyumbang dana kemahasiswaan termasuk menyampaikan progres mahasiswa kedokteran jalur ikatan dinas.

c. Analisis Keberhasilan Sasaran :

Adapun pencapaian yang dihasilkan dalam mendukung keberhasilan sasaran ini yaitu terlaksananya semua kegiatan di Bagian Kesejahteraan Rakyat khususnya dalam penyaluran bantuan sosial, pendidikan dan bantuan keagamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sasaran : 3

Terciptanya undang-undang dan pelayanan bantuan hukum serta dokumentasi hukum melalui penyusunan produk hukum, sosialisasi produk hukum dan pengkajian perundang-undangan

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel III. 8

Indikator Pencapaian Sasaran 2

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5	6	7
3.	Terciptanya undang-undang dan pelayanan bantuan hukum serta dokumentasi hukum melalui penyusunan produk hukum, sosialisasi produk hukum, dan pengkajian produk perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase Raperda yang telah di Perdakan2. Tingkat penyelesaian kasus/ perkara yang ditangani sampai tuntas3. Tingkat kelengkapan buku dan peraturan perundang-undangan yang didokumentasikan, dipelihara dan dikelola	<p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>80</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>80</p>
Capaian Kinerja Sasaran "SANGAT BERHASIL"						87,50



- 1) Persentase Raperda Yang Telah diperdakan
Capaian indikator kinerja persentase raperda yang telah diperdakan sebesar 100% dapat dikategorikan **sangat berhasil** .
Raperda yang telah diperdakan atau yang telah diundangkan dalam lembaran daerah yaitu 10 Perda dari target 10 perda.
- 2) Tingkat penyelesaian kasus/ perkara yang ditangani sampai tuntas
Capaian indikator kinerja tingkat penyelesaian kasus/perkara yang ditangani sampai tuntas sebesar 100% dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 3) Tingkat kelengkapan buku dan peraturan perundang-undangan yang didokumentasikan, dipelihara dan dikelola.
Capaian indikator Tingkat kelengkapan buku dan peraturan perundang-undangan yang didokumentasikan, dipelihara dan dikelola sebesar 80% dapat dikategorikan **berhasil**.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III. 9

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
3.	Terciptanya undang-undang dan pelayanan bantuan hukum serta dokumentasi hukum melalui penyusunan produk hukum, sosialisasi produk hukum, dan pengkajian produk perundang-undangan	1. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	528.967.170,-	519.334.170,-	98,17		
		Rata-rata			98,17	87,50	

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,17% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 87,50%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber daya belum efisien.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 Dengan Realisasi Tahun 2020 Dan Target Akhir 2021



Tabel III.10
Perbandingan Realisasi Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021
1	2	3		4	6	6	7
2	Terciptanya undang-undang dan pelayanan bantuan hukum serta dokumentasi hukum melalui penyusunan produk hukum, sosialisasi produk hukum, dan pengkajian produk perundang-undangan	1.	Persentase Raperda yang telah di Perdakan	%	100	100	100
2.		Tingkat penyelesaian kasus/ perkara yang ditangani sampai tuntas	%	100	100	100	
3.		Tingkat kejelasan dan kepastian batas kecamatan	%	80	80	100	

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Hambatan serta pemecahan masalah

a. Hambatan dalam pencapaian sasaran

1. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang ada pada Bagian Hukum untuk mengkaji produk hukum yang terlalu cepat mengalami perubahan, sehingga untuk pengkajian produk hukum perlu waktu yang cukup lama.
2. Masih belum optimalnya dalam melakukan tugas pendampingan hukum.
3. Terbatasnya anggaran dalam melakukan sosialisasi produk hukum

b. Upaya yang dilakukan :

1. Meningkatkan kemampuan SDM sehingga mampu melakukan penafsiran yang akurat dan teliti dalam menelaah produk hukum.
2. Melakukan peningkatan pendampingan hukum terhadap kepentingan Pemerintah Kabupaten Sintang serta aktif mengikuti proses peradilan sesuai dengan Hukum Acara.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi produk hukum.



Sasaran : 4

Tersusunnya Juknis Pembinaan dan Pelaksanaan Operasional Bidang Perekonomian dan Pembangunan Untuk Kelancaran Pembinaan dan Proses Administrasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel III. 11

Indikator Pencapaian Sasaran 4

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5	6	7
4.	Tersusunnya juknis pembinaan dan pelaksanaan operasional bidang perekonomian dan pembangunan untuk kelancaran pembinaan dan proses administrasi bidang perekonomian dan pembangunan	<ol style="list-style-type: none">1. Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan perekonomian2. Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan pembangunan3. Tingkat pemanfaatan data dan hasil-hasil perekonomian sebagai bahan evaluasi acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya4. Tingkat pemanfaatan data dan hasil-hasil pembangunan sebagai bahan evaluasi acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya	<p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>85</p> <p>85</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>85</p> <p>85</p>
Capaian Kinerja Sasaran 'SANGAT BERHASIL'						85,00

- 1) Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan perekonomian.
Capaian indikator kinerja Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan perekonomian sebesar 100% dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**.
- 2) Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan pembangunan.
Capaian indikator kinerja tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan pembangunan sebesar 100% dapat dikategorikan **sangat berhasil**.



- 3) Tingkat pemanfaatan data dan hasil-hasil perekonomian sebagai bahan evaluasi acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya.
Capaian indikator kinerja Tingkat pemanfaatan data dan hasil-hasil perekonomian sebagai bahan evaluasi acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya sebesar 85% dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 4) Tingkat pemanfaatan data dan hasil-hasil pembangunan sebagai bahan evaluasi acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya.
Capaian indikator kinerja Tingkat pemanfaatan data dan hasil-hasil pembangunan sebagai bahan evaluasi acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya sebesar 85% dapat dikategorikan **sangat berhasil**.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III. 11

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
4.	Tersusunnya juknis pembinaan dan pelaksanaan operasional bidang perekonomian dan pembangunan untuk kelancaran pembinaan dan proses administrasi bidang perekonomian dan pembangunan	1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	222.889.012,-	186.076.012,-	83,48		
		2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	40.031.300,-	38.079.100,-	95,12		
		Rata-rata			89,30	85,00	

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 89,30% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 85,00%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya **belum efisien**.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 Dengan Realisasi Tahun 2020 Dan Target Akhir 2021

Tabel III. 13

Perbandingan Realisasi Kinerja



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021
1	2	3		4	6	6	7
4	Tersusunnya juknis pembinaan dan pelaksanaan operasional bidang perekonomian dan pembangunan untuk kelancaran pembinaan dan proses administrasi bidang perekonomian dan pembangunan	1	Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan perekonomian	%	85	100	100
		2	Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan pembangunan	%	90	100	100
		3	Tingkat pemanfaatan data dan hasil-hasil perekonomian sebagai bahan evaluasi acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya	%	90	85	100
		4	Tingkat pemanfaatan data dan hasil-hasil pembangunan sebagai bahan evaluasi acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya	%	90	85	100

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Hambatan serta pemecacahan masalah

a. Hambatan

Kurangnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah terkait serta sulitnya mendapatkan data yang akurat untuk perencanaan dan evaluasi.

b. Upaya yang dilakukan dapat dilakukan dalam mengatasi masalah adalah meningkatkan koordinasi antar OPD terkait sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan program kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik.

c. Pencapaian yang dihasilkan sebagai berikut :

- 1) Terasiliasinya penyelesaian masalah bidang perekonomian dan pembangunan.
- 2) Tersedianya data dan informasi proses penyelesaian masalah bidang investasi.
- 3) Tersusunnya Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang Tahun 2021.
- 4) Terlaksananya program Raskin tahun 2021 di Kabupaten Sintang.



Sasaran : 5

Tersusunnya Bahan Perumusan Kebijakan, Pengoorganisasian, Strategi, Pembinaan, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Penyelesaian Sengketa Lelang di Kabupaten Sintang Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel III. 14

Indikator Pencapaian Sasaran 5

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5	6	7
5.	Tersusunnya bahan perumusan kebijakan, pengoorganisasi, strategi, pembinaan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan penyelesaian sengketa lelang di kabupaten sintang dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase penyebarluasan bahan SOP dan SPM pengadaan barang / Jasa pemerintah kepada masyarakat.2. Persentase ketersediaan tenaga ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.3. Persentase pelaksanaan proses pengadaan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan.4. Persentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.5. Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang.6. Persentase unit kerja yang telah melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang.7. Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil lelang pengadaan	% % % % % %	80 80 80 80 90 90	100 30 80 0 90 90	125 37,50 100 00,0 100 100



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5	6	7
		barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitas penyelesaian sengketa. 8. Rasio pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitas penyelesaian sengketa lelang.	%	90	90	100
Capaian Kinerja Sasaran " BERHASIL "						76,25

- 1) Persentase penyebarluasan bahan SOP dan SPM pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat
Capaian indikator kinerja Persentase penyebarluasan bahan SOP dan SPM pengadaan barang / Jasa pemerintah kepada masyarakat sejumlah 125% dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 2) Persentase ketersediaan tenaga ahli pengadaan barang/jasa pemerintah
Capaian indikator kinerja Persentase ketersediaan tenaga ahli pengadaan barang/jasa pemerintah sejumlah 37,50% dapat dikategorikan **tidak berhasil**.
- 3) Persentase pelaksanaan proses pengadaan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan
Capaian indikator kinerja Persentase pelaksanaan proses pengadaan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan sejumlah 100% dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 4) Persentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
Capaian indikator kinerja Persentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sejumlah 0% dapat dikategorikan **tidak berhasil**.
- 5) Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pelayanan dan fasilitas penyelesaian sengketa lelang
Capaian indikator kinerja Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pelayanan dan fasilitas penyelesaian sengketa lelang sejumlah 100% dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 6) Persentase unit kerja yang telah melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang / jasa pemerintah, pelaksanaan pelayanan dan fasilitas penyelesaian sengketa lelang.



Capaian indikator kinerja Persentase unit kerja yang telah melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang / jasa pemerintah, pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang sejumlah 100% dapat dikategorikan **sangat berhasil**.

- 7) Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil lelang pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitas penyelesaian sengketa

Capaian indikator kinerja Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil lelang pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitas penyelesaian sengketa sejumlah 100% dapat dikategorikan **sangat berhasil**.

- 8) Rasio pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitas penyelesaian sengketa lelang.

Capaian indikator kinerja Rasio pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitas penyelesaian sengketa lelang sejumlah 88,89% dapat dikategorikan **sangat berhasil**.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III. 15
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
5.	Tersusunnya bahan perumusan kebijakan, pengoorganisasi, strategi, pembinaan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan penyelesaian sengketa lelang di kabupaten sintang dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah	1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	254.596.560,-	246.003.346,-	96,62		
		Rata-rata			96,62	92,50	



Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 96,62% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 92,50%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya **belum efisien**.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5 dengan realisasi tahun 2020 dan target akhir 2021

Tabel III. 16

Perbandingan Realisasi Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
5.	Tersusunnya bahan perumusan kebijakan, pengoorganisasi, strategi, pembinaan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan penyelesaian sengketa lelang di kabupaten sintang dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase penyebarluasan bahan SOP dan SPM pengadaan barang / Jasa pemerintah kepada masyarakat.2. Persentase ketersediaan tenaga ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.3. Persentase pelaksanaan proses pengadaan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan.4. Persentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.5. Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang.6. Persentase unit kerja yang telah melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang / jasa pemerintah, pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang.7. Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil lelang pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitas penyelesaian sengketa.8. Rasio pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitas penyelesaian sengketa lelang.	<p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>dok</p> <p>%</p>	<p>80</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>90</p> <p>1</p> <p>80</p>	<p>100</p> <p>30</p> <p>80</p> <p>0</p> <p>90</p> <p>90</p> <p>1</p> <p>90</p>	<p>80</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>90</p> <p>90</p> <p>1</p> <p>90</p>



4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Hambatan serta pemecacahan masalah

a. Hambatan

- 1) Masih terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memahami tentang pengadaan barang/jasa.
- 2) Belum adanya Kelompok Kerja (Pokja) Permanen yang masih bersifat Ad Hoc (Pinjaman dari SKPD lainnya)
- 3) Masih belum adanya aturan yang mengatur dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa lelang yang digunakan untuk memfasilitasi permasalahan lelang yang dilaksanakan oleh Pokja dimana pihak penyedia merasakan dirugikan dalam pelelangan dengan mengajukan sanggah/aduan untuk disampaikan dan diketahui oleh yang berkompeten dalam pelaksanaan.
- 4) Sistem pelaporan masih belum maksimal.

b. Upaya yang harus dilakukan :

- 1) Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM), Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa.
- 2) Penempatan/Pemindahan, Pengangkatan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan sebagai Staf di Bagian Pengadaan.
- 3) Harus adanya aturan yang mengatur dalam memfasilitasi pelaksanaan penyelesaian sengketa lelang.
- 4) Perlu adanya peran provinsi untuk mengadopsi untuk Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pelaporan Monev, dimana monev sudah diatur di dalam e-monev melalui online yang dikelola oleh Pejabat Penghubung masing-masing Kabupaten/Kota.

c. Analisis keberhasilan dalam pencapaian sasaran sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya penyebarluasan bahan SOP dan SPM pengadaan barang dan jasa.
- 2) Tersedianya tenaga ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 3) Terfasilitasinya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- 4) Terkoordinirnya pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- 5) Tersedianya dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil lelang pengadaan barang/jasa pemerintah.



Sasaran : 6

Tersusunnya Perumusan Kebijakan Daerah Di Bidang Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Pertambangan, Lingkungan Hidup, Energi dan Air

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel III. 17

Indikator Pencapaian Sasaran 6

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5	6	7
6.	Tersusunnya perumusan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air	1. Jumlah dokumen profil daerah tentang sumber daya alam. 2. Jumlah dokumen kebijakan daerah di bidang sumber daya alam	dok dok	1 1	1 1	100 100
Capaian Kinerja Sasaran "SANGAT BERHASIL"						92,50

1) Jumlah dokumen profil daerah tentang sumber daya alam.

Capaian kinerja Jumlah dokumen profil daerah tentang sumber daya alam sebesar 100 % dapat dikategorikan **sangat berhasil**.

2) Jumlah dokumen kebijakan daerah di bidang sumber daya alam.

Capaian kinerja jumlah dokumen kebijakan daerah di bidang sumber daya alam sebesar 100% dapat dikategorikan **sangat berhasil**.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III. 18

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



No.	Sasaran	Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
6.	Tersusunnya perumusan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air	1. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	92.808.000,-	89.731.800,-	96,98		
		Rata-rata			96,68	92,50	

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 96,68% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 92,50%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya **belum efisien**.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 6 dengan realisasi tahun 2020 dan target akhir 2021

Tabel III. 19
Perbandingan Realisasi Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
6.	Tersusunnya perumusan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air	1. Jumlah dokumen profil daerah tentang sumber daya alam.	dok	1	1	1
		2. Jumlah dokumen kebijakan daerah di bidang sumber daya alam	dok	1	1	1

4. Analisis keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target sasaran

- 1) Masih lemahnya cara mendapatkan data yang akurat dari pihak-pihak terkait, sehingga seringkali berbeda data yang dikumpulkan dengan data yang ditemukan langsung di lapangan.



- 2) Kurang tersedianya dana yang cukup untuk menyusun profil daerah sumber daya alam yang berkualitas.
5. Upaya yang dapat dilakukan dalam pemecahan masalah adalah :
 - 1) Meningkatnya intensitas koordinasi dan sosialisasi untuk mendapatkan data-data yang dapat disusun untuk menjadi dokumen profil daerah tentang sumber daya alam yang berkualitas dan dapat dijadikan bahan kebijakan pengembangan potensi sumber daya alam Kabupaten Sintang.
 - 2) Bagian Sumber Daya Alam mengusulkan kembali peningkatan anggaran pada tahun 2021 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif.

Sasaran : 7

Terlaksananya pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian yang tertib dan lancar, tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan administrasi dan operasional di lingkungan Sekretariat Daerah

1. Perbandingan Antara Target dan realisasi Kinerja tahun 2021

Tabel III. 20

Indikator Pencapaian Sasaran 7

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5	6	7
7.	Terlaksananya pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian yang tertib dan lancar, tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan administrasi dan operasional di lingkungan Sekretariat Daerah.	<ol style="list-style-type: none">1. Tingkat kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor milik pemerintah.2. Tingkat kelayakan sarana dan prasarana gedung kantor milik pemerintah3. Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana disetiap Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Sintang.4. Tingkat kelayakan sarana dan prasarana bagian di lingkungan Setda Kabupaten Sintang	% % % %	100 100 100 100	95 90 90 90	95 90 90 90



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5	6	7
		5. Tingkat pemenuhan kebutuhan kantor atas barang dan jasa	%	100	90	90
		6. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesejahteraan pegawai	%	100	90	90
		7. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan	%	100	95	95
		8. Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan disiplin.	%	100	90	90
		9. Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan sanksi pelanggaran disiplin pegawai	%	100	90	90
		10. Indeks kepuasan pegawai terhadap penghargaan dan prestasi kerja	%	100	80	80
		11. Tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas pokok Setda dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.	%	100	95	95
		12. Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan terhadap Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.	%	100	95	95
Capaian Kinerja Sasaran " SANGAT BERHASIL "						91,25

- 1) Tingkat kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor milik pemerintah.
Capaian indikator kinerja Tingkat kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor milik pemerintah sebesar 95%, dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 2) Tingkat kelayakan sarana dan prasarana gedung kantor milik pemerintah.
Capaian indikator kinerja Tingkat kelayakan sarana dan prasarana gedung kantor milik pemerintah sebesar 90%, dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 3) Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana disetiap Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Sintang.
Capaian indikator kinerja Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana disetiap Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Sintang sebesar 90%, dapat dikategorikan **sangat berhasil**.



- 4) Tingkat kelayakan sarana dan prasarana bagian di lingkungan Setda Kabupaten Sintang. Capaian indikator kinerja Tingkat kelayakan sarana dan prasarana bagian di lingkungan Setda Kabupaten Sintang sebesar 90%, dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 5) Tingkat pemenuhan kebutuhan kantor atas barang dan jasa.
Capaian indikator kinerja Tingkat pemenuhan kebutuhan kantor atas barang dan jasa sebesar 90%, dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 6) Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesejahteraan pegawai.
Capaian indikator kinerja Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesejahteraan pegawai sebesar 90%, dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 7) Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan.
Capaian indikator kinerja Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan sebesar 95%, dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 8) Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan disiplin.
Capaian indikator kinerja Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan disiplin sebesar 90%, dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 9) Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan sanksi pelanggaran disiplin pegawai.
Capaian indikator kinerja Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan sanksi pelanggaran disiplin pegawai sebesar 90%, dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 10) Indeks kepuasan pegawai terhadap penghargaan dan prestasi kerja.
Capaian indikator kinerja Indeks kepuasan pegawai terhadap penghargaan dan prestasi kerja sebesar 80%, dapat dikategorikan **berhasil**.
- 11) Tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas pokok Setda dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Capaian indikator kinerja Tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas pokok Setda dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku sebesar 80%, dapat dikategorikan **berhasil**.
- 12) Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan terhadap Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
Capaian indikator kinerja Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan terhadap Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sebesar 95%, dapat dikategorikan **sangat berhasil**.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



Tabel III. 21
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
7.	Terlaksananya pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian yang tertib dan lancar, tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan administrasi dan operasional di lingkungan Sekretariat Daerah	1. Peningkatan sarana dan prasarana	3.465.727.260,-	3.374.136.500	97,35		
		2. Administrasi kepegawaian daerah	70.625.000,-	70.311.000	99,55		
		3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	193.609.000,-	192.946.819,-	99,52		
		4. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala daerah/wakil KDH	791.301.260,-	643.880.538,-	81,36		
		5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.095.491.080,-	1.996.357.243,-	95,26		
		6. Fasilitasi kerumahtanggaan Setda	2.349.887.000,-	2.068.310.000,-	88,01		
		Rata-rata					

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 93,50% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 78,75%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya **belum efisien**.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 7 dengan realisasi tahun 2020 dan target akhir 2021

Tabel III. 22
Perbandingan Realisasi Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
7.	Terlaksananya pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian yang tertib dan lancar, tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan administrasi dan operasional di lingkungan Sekretariat Daerah.	1. Tingkat kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor milik pemerintah.	%	70	95	100
		2. Tingkat kelayakan sarana dan prasarana gedung kantor milik pemerintah	%	70	90	100
		3. Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana disetiap Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Sintang.	%	80	90	100



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
		4. Tingkat kelayakan sarana dan prasarana bagian di lingkungan Setda Kabupaten Sintang	%	85	90	100
		5. Tingkat pemenuhan kebutuhan kantor atas barang dan jasa	%	70	90	100
		6. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesejahteraan pegawai	%	80	90	100
		7. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan	%	80	95	100
		8. Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan disiplin.	%	70	90	100
		9. Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan sanksi pelanggaran disiplin pegawai	%	70	90	100
		10. Indeks kepuasan pegawai terhadap penghargaan dan prestasi kerja	%	70	80	100
		11. Tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas pokok Setda dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.	%	80	95	100
		12. Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan terhadap Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.	%	100	95	100

4. Kendala dan hambatan :

- 1) Rendahnya tingkat kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam disiplin kerja dan pengisian absen harian.
- 2) Rendahnya kesadaran ASN dalam penyimpanan data personal untuk pembaharuan (Update) data pegawai.
- 3) Kurangnya tenaga teknis membidangi membidangi beberapa kegiatan misalnya kearsipan.
- 4) Pengelolaan arsip masih belum optimal.
- 5) Kurangnya tenaga teknis yang membidangi urusan domestik rumah pimpinan.



- 6) Tenaga Fungsional sedikit sekali menguasai teknologi sehingga pelayanan pada masyarakat lebih banyak bersifat manual.
 - 7) Minimnya sarana yang dimiliki sehingga pelayanan terhadap pimpinan sering kurang optimal.
 - 8) Inventarisasi aset pada rumah tangga masih belum optimal.
5. Upaya yang dilakukan dan pemecahannya :
- 1) Perlu adanya sanksi langsung berupa pemotongan kesejahteraan pegawai.
 - 2) Menyiapkan surat edaran terkait update data pegawai dan menghimbau secara langsung kepada ASN.
 - 3) Mengirim staf untuk mengikuti kursus teknis kearsipan.
 - 4) Mengoptimalkan kinerja tenaga arsiparis sesuai tupoksinya.
 - 5) Menunjuk staf aparatur sipil negara (ASN) untuk khusus mengelola kearsipan secara profesional
 - 6) Penganggaran untuk diklat teknis terkait pelayanan rumah tangga pimpinan
 - 7) Penyediaan aplikasi berbasis teknologi informasi pada tugas pokok dan fungsi tenaga fungsional umum yang berkaitan langsung pada pelayanan masyarakat
 - 8) Menyusun program kerja prioritas dalam rangka peningkatan kinerja tenaga fungsional umum pada rumah tangga pimpinan.
 - 9) Mengoptimalkan tenaga pembantu pengurus barang pada masing-masing rumah tangga pimpinan.
6. Analisis pencapaian kinerja sasaran
- Untuk pencapaian sasaran memfasilitasikan dan mengkoordinir kegiatan dalam rangka urusan perawatan dan rumah tangga, ketatausahaan, kepegawaian, serta pelayanan administrasi dan operasional Sekeretariat Daerah, perlu didukung dengan dana yang memadai serta diperlukan kerjasama antara unsur pimpinan dan staf, sehingga terwujud sistem administrasi, pelayanan kepegawaian, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran serta pelayanan sistem administrasi yang baik.



Sasaran : 8

Tersusun dan terselenggaranya kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta kinerja dan reformasi birokrasi

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel III. 23

Indikator Pencapaian Sasaran 8

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5	6	7
8.	Tersusun dan terselenggaranya kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.	1. Jumlah rancangan Perda dan Perbup SOP dan SOTK.	dok	2	2	100
		2. Jumlah Analisis Jabatan perangkat Daerah yang disusun.	dok	1	0	0
		3. Standar kompetensi jabatan yang disusun	dok	1	0	0
		4. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik.	%	95	90	94,74
		5. Persentase fasilitasi implementasi ketatalaksanaan.	%	85	85	100
		6. Persentase penguatan SAKIP Kabupaten	%	100	90	90
		7. Persentase pelaksanaan Percepatan reformasi birokrasi	%	100	80	80
Capaian Kinerja Sasaran " BERHASIL "						71,79

1) Jumlah rancangan Perda dan Perbup SOP dan SOTK

Capaian indikator kinerja Jumlah rancangan Perda dan Perbup SOP dan SOTK sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan **sangat berhasil**.

2) Jumlah Analisis Jabatan perangkat daerah yang disusun

Capaian indikator kinerja Jumlah Analisis Jabatan perangkat Daerah yang disusun sebesar 0% sehingga dapat dikategorikan **tidak berhasil**.



- 3) Standar kompetensi jabatan yang disusun
Capaian indikator kinerja Standar kompetensi jabatan yang disusun sebesar 0% sehingga dapat dikategorikan **tidak berhasil**.
- 4) Persentase penyelenggaraan pelayanan publik
Capaian indikator kinerja Persentase penyelenggaraan pelayanan publik sebesar 94,74% sehingga dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 5) Persentase fasilitasi implementasi ketatalaksanaan
Capaian indikator kinerja Persentase fasilitasi implementasi ketatalaksanaan sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan **berhasil**.
- 6) Persentase penguatan SAKIP Kabupaten
Capaian indikator kinerja persentase penguatan sakip sebesar 90% dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 7) Persentase pelaksanaan Percepatan reformasi birokrasi
Capaian indikator kinerja persentase pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi sebesar 80% dapat dikategorikan **berhasil**.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III. 24

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
8.	Tersusun dan terselenggaranya kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta kinerja dan reformasi birokrasi	1. Penataan Organisasi	131.354.600,-	123.661.200,-	94,14		
			Rata-rata		94,14	76,79	

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 94,14% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 76,79%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya **belum efisien**.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 8 dengan realisasi tahun 2020 dan target akhir 2021

Tabel III. 25

Perbandingan Realisasi Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
8.	Tersusun dan terselenggaranya kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.	1. Jumlah rancangan Perda dan Perbup SOP dan SOTK. 2. Jumlah Analisis Jabatan perangkat Daerah yang disusun. 3. Standar kompetensi jabatan yang disusun 4. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik. 5. Persentase fasilitasi implementasi ketatalaksanaan. 6. Persentase penguatan SAKIP 7. Persentase pelaksanaan Percepatan reformasi birokrasi	dok dok dok % % % %	2 1 0 80 80 80 70	2 0 0 90 85 90 80	100 100 1 90 75 80 80

4. Hambatan dan kendala

- 1) Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terlalu cepat mengalami perubahan.
- 2) Belum dilakukannya penyempurnaan dokumen analisis jabatan.
- 3) Terbatasnya SDM dalam menyikapi perubahan regulasi yang terkait dengan reformasi birokrasi dan pelayanan publik

5. Upaya yang dilakukan

- 1) Menyikapi setiap regulasi dengan cermat untuk diimplementasikan.
- 2) Melakukan pendampingan dalam penyusunan analisis jabatan.
- 3) Meningkatkan kemampuan SDM yang ada dalam rangka percepatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik sesuai dengan tuntutan regulasi dan kebijakan.



6. Analisis Keberhasilan

- Hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik terhadap unit penyelenggara pelayanan, menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana Kabupaten Sintang mendapatkan penghargaan dari Gubernur Kalimantan Barat atas Raihan Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) Standar P Tahun 2021 Peringkat 14 Kategori Pemerintah Kabupaten dari 416 Kabupaten se Indonesia oleh Ombudsman Republik Indonesia.
- Adapun pencapaian kinerja dalam bidang Reformasi Birokrasi adalah telah dilakukan penyederhanaan birokrasi dengan melakukan penyetaraan jabatan eselon IV ke jabatan fungsional dengan melantik pejabat fungsional setara ahli muda sebanyak 247 orang.

Sasaran : 9

TERWUJUDNYA SISTEM PENDOKUMENTASIAN TERPADU PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN, SERTA TERWUJUDNYA PELAYANAN KEHUMASAN DAN PROTOKOL YANG TEPAT CEPAT DAN AKURAT.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel III.26

Indikator Pencapaian Sasaran 9

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5	6	7
9.	Terwujudnya sistem pendokumentasian terpadu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta terwujudnya pelayanan kehumasan dan protokol yang tepat cepat dan akurat.	1. Persentase jumlah informasi atau kegiatan yang seharusnya diliput atau diberitakan	%	98	90	92
		2. Persentase jumlah informasi dan kegiatan pelayanan dan pembangunan yang telah diinformasikan kepada masyarakat	%	95	90	92,50
Capaian Kinerja Sasaran "SANGAT BERHASIL"						92,50



- 1) Persentase jumlah informasi atau kegiatan yang seharusnya diliput atau diberitakan
Capaian indikator kinerja Persentase jumlah informasi atau kegiatan yang seharusnya diliput atau diberitakan sebesar 92% dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**.

- 2) Persentase jumlah informasi dan kegiatan pelayanan dan pembangunan yang telah diinformasikan kepada masyarakat
Capaian indikator kinerja Persentase jumlah informasi dan kegiatan pelayanan dan pembangunan yang telah diinformasikan kepada masyarakat sebesar 92,50% dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III. 27

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
9.	Terwujudnya sistem pendokumentasian terpadu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta terwujudnya pelayanan kehumasan dan protokol yang tepat cepat dan akurat	1. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.119.391.000,-	4.097.145.439,-	99,45		
		Rata-rata			99,45	77,50	

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,45% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 77,50%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya belum efisien.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 9 dengan realisasi tahun 2020 dan target akhir 2021



Tabel III. 28
Perbandingan Realisasi Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021
1	2	3	4	6	6	7
9	Terwujudnya sistem pendokumentasian terpadu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta terwujudnya pelayanan kehumasan dan protokol yang tepat cepat dan akurat.	1. Persentase jumlah informasi atau kegiatan yang seharusnya diliput atau diberitakan	%	80	90	98
		2. Persentase jumlah informasi dan kegiatan pelayanan dan pembangunan yang telah diinformasikan kepada masyarakat	%	80	90	95

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Hambatan serta pemecahan masalah

- Dalam pelaksanaan tugas masih terkendala dengan minimnya sarana yang tersedia saat ini, karena sarana tersebut tidak dapat difungsikan secara maksimal seperti belum dapat mengakses internet untuk mengedit berita dilapangan.
- Memfasilitasi dan mengkoordinir berbagai kegiatan unit kerja / instansi di bidang protokol dan komunikasi pimpinan, dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran sesuai dengan program dan penganggaran secara efektif.



Sasaran : 10

Optimalisasi Penyusunan Program, Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan Serta Pelayanan Administrasi Keuangan yang Lancar

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel III. 29

Indikator Pencapaian Sasaran 10

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5	6	7
10.	Optimalisasi penyusunan program, rencana kerja anggaran dan pelaporan serta pelayanan administrasi keuangan yang lancar.	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah laporan keuangan Sekretariat Daerah yang disusun.2. Jumlah dokumen rencana kinerja dan anggaran Sekretariat Daerah.3. Jumlah laporan pencapaian kinerja dan anggaran Sekretariat Daerah.4. Jumlah laporan semesteran dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah.5. Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran Sekretariat Daerah.6. Jumlah laporan keuangan akhir tahun Sekretariat Daerah.7. Tersusunnya dokumen anggaran Sekretariat Daerah.8. Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2017-20219. Jumlah Surat Keputusan Pendukung	<p>%</p> <p>dok</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>dok</p> <p>dok</p> <p>dok</p> <p>dok</p> <p>dok</p>	<p>100</p> <p>1</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p>	<p>100</p> <p>1</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>50</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>
Capaian Kinerja Sasaran " SANGAT BERHASIL "						85,28

- 1) Jumlah laporan keuangan Sekretariat Daerah yang disusun
Capaian indikator kinerja Jumlah laporan keuangan Sekretariat Daerah yang disusun sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan **sangat berhasil**.



- 2) Jumlah dokumen rencana kinerja dan anggaran Sekretariat Daerah
Capaian indikator kinerja Jumlah dokumen rencana kinerja dan anggaran Sekretariat Daerah sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 3) Jumlah laporan pencapaian kinerja dan anggaran Sekretariat Daerah
Capaian indikator kinerja Jumlah laporan pencapaian kinerja dan anggaran Sekretariat Daerah sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 4) Jumlah laporan semesteran dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah
Capaian indikator kinerja Jumlah laporan semesteran dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 5) Jumlah laporan semesteran dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah
Capaian indikator kinerja Jumlah laporan semesteran dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah sebesar 50% sehingga dapat dikategorikan **tidak berhasil**.
- 6) Jumlah laporan keuangan akhir tahun Sekretariat Daerah
Capaian indikator kinerja Jumlah laporan keuangan akhir tahun Sekretariat Daerah sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 7) Tersusunnya dokumen anggaran Sekretariat Daerah
Capaian indikator kinerja Tersusunnya dokumen anggaran Sekretariat Daerah sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 8) Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2017-2021
Capaian indikator kinerja Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2017-2021 sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 9) Jumlah Surat Keputusan Pendukung
Capaian indikator kinerja Jumlah Surat Keputusan Pendukung sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan **sangat berhasil**.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III. 30
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



No.	Sasaran	Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%		
10.	Optimalisasi penyusunan program, rencana kerja anggaran dan pelaporan serta pelayanan administrasi keuangan yang lancar	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.511.070,-	22.430.800,-	95,41		
		Rata-rata			95,41	77,50	

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 95,41% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 77,50%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya **belum efisien**.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 10 dengan Realisasi Tahun 2020 dan Target Akhir 2021

Tabel III. 31
Perbandingan Realisasi Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
10.	Optimalisasi penyusunan program, rencana kerja anggaran dan pelaporan serta pelayanan administrasi keuangan yang lancar.	1. Jumlah laporan keuangan Sekretariat Daerah yang disusun.	%	100	100	1
		2. Jumlah dokumen rencana kinerja dan anggaran Sekretariat Daerah.	dok	1	1	1
		3. Jumlah laporan pencapaian kinerja dan anggaran Sekretariat Daerah.	%	100	100	1
		4. Jumlah laporan semesteran dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah.	%	100	100	2
		5. Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran Sekretariat Daerah.	dok	1	1	2
		6. Jumlah laporan keuangan akhir tahun Sekretariat Daerah.	dok	2	2	2
		7. Tersusunnya dokumen anggaran Sekretariat Daerah.	dok	1	1	1



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
		8. Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2017-2021	dok	1	1	1
		9. Jumlah Surat Keputusan Pendukung	dok	4	2	2

4. Analisis Pencapaian sasaran

Mengkoordinir kegiatan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pelaporan serta pelayanan administrasi keuangan.

Adapun pencapaian yang dihasilkan sebagai berikut :

- 1) Adanya laporan keuangan Setda.
- 2) Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Setda.
- 3) Adanya laporan pencapaian kinerja dan Anggaran Setda.
- 4) Adanya laporan semesteran dan realisasi Anggaran Setda.
- 5) Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran Setda.
- 6) Adanya laporan keuangan akhir tahun Setda.
- 7) Tersusunnya dokumen anggaran setda.
- 8) Adanya Surat Keputusan Pendukung.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang menetapkan Belanja Daerah Tahun 2021 sebesar Rp. 56.832.566.125,00 dan terealisasi sebesar Rp. 53.028.474.857,00 atau 93,31% terdiri dari:

1. Belanja Operasi Rp.56.264.101.046,00 terealisasi sebesar Rp.52.489.961.038,00 atau 93,29%, dan
2. Belanja Modal Rp.568.465.080,00- terealisasi sebesar Rp.538.513.819,00 atau 94,73%.

Dibandingkan dengan jumlah pagu dan realisasi anggaran tahun 2020 sejumlah Rp. 44.166.744.105,69 terdapat kenaikan sebesar Rp. 12.665,822.020 atau terjadi penurunan sebesar 57,86%.

Realisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang per-kegiatan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel III. 32

Realisasi Anggaran Setda Tahun 2021

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.511.070,-	22.430.800,-	95,41
2.	Administrasi Keuangan Daerah	13.098.156.220,-	12.064.402.001,-	92,10
3.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	7.407.000,-	7.226.600,-	97,56
4.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	3.465.727.260,-	3.374.136.500	97,35
5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.625.000,-	70.311.000,-	99,55
6..	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.130.969.783,-	3.806.593.851,-	92,14
7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	193.609.000,-	192.946.819,-	99,65
8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	5.621.568.800,-	4.901.484.282,-	97,19
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.095.491.080,-	1.996.357.243,-	95,26
10.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	791.301.260,-	643.880.538,-	81,36
11.	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.349.887.000,-	2.068.310.000,-	88,01
12.	Penataan Organisasi	131.354.600,-	123.661.200,-	94,14
13.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.119.391.000,-	4.097.145.439,-	99,45
14.	Administrasi Tata Pemerintahan	955.543.000,-	678.480.000,-	71,00
15.	Pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat	22.104.438.880,-	21.314.971.283,-	96,42
16	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	528.967.170,-	519.334.170,-	98,17
17.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	222.889.012,-	186.076.012,-	83,48
18.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	40.031.300,-	38.079.100,-	95,12
19.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	254.596.560,-	246.003.346,-	96,62
20.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	92.808.000,-	89.731.800,-	96,68
	Jumlah Belanja Daerah	56.832.585.125,-	53.127.388.483-	93,48



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021, merupakan LKjIP terakhir pada masa periode RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021 dan RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 serta laporan ini menggambarkan tindaklanjut dari evaluasi atas SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2020.

Mengacu pada Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dan sesuai dengan hasil perhitungan terhadap indikator kinerja, dari 10 (sepuluh) sasaran strategis yang diukur, 6 (enam) sasaran dikategorikan **sangat berhasil** dan 4 (empat) sasaran dikategorikan **berhasil**. Hasil ini tentunya menjadi acuan bagi Sekretariat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan sasaran strategis yang ideal.

Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang merumuskan beberapa langkah penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program, dengan melakukan langkah berikut ini :

- a. Melakukan reviu terhadap dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah dalam upaya untuk meningkatkan kedalaman berakuntabilitas.
- b. Penajaman kembali strategi kebijakan pembangunan yang harus terjabarkan dalam program kerja agar lebih fokus dan realistis dalam mencapai sasaran-sasaran kebijakan pembangunan.
- c. Peningkatan sumber daya manusia, penyempurnaan infrastruktur dan perangkat aparatur Pemerintah Daerah.
- d. Meningkatkan efektifitas dan re-efisiensi program sebagai proses manajemen, antara lain :
 - 1) Penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan akan dilakukan lebih akurat dan cermat.
 - 2) Meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan.
 - 3) Meningkatkan reformasi birokrasi dalam upaya menghadapi perkembangan jaman dan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan baik, melalui peningkatan kualitas SDM aparatur dan efektivitas kelembagaan.

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)	Capaian Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, penataan daerah/wilayah, peningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintah kecamatan	1. Tingkat persiapan dan kesiapan dan kelayakan pembentukan kecamatan baru 2. Tingkat kejelasan dan kepastian batas daerah Kabupaten Sintang 3. Tingkat kejelasan dan kepastian batas kecamatan	% % %	95 80 85	70 60 70	73.68 75.00 82.35	77.50 77.50 77.50
Capaian Kinerja Sasaran "BERHASIL"						77.01	77.50
2.	Terlaksananya pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat dan umat beragama serta terlaksananya pemberian bantuan sosial, pendidikan, kesehatan dan bantuan bidang keagamaan	1. Tingkat pengetahuan ketrampilan penerimaan bantuan dalam penyusunan SPJ 2. Tingkat kelancaran penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten Sintang 3. Persentase usaha kesehatan sekolah yang aktif 4. Jumlah bantuan sosial/keagamaan, kesmas, bantuan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat. 5. Tingkat kerukunan umat beragama 6. Tingkat ketersediaan data dan informasi penerima bantuan 7. Evaluasi mahasiswa ikatan dinas 8. Tingkat penerimaan bakal calon mahasiswa baru jalur kerjasama dan jalur beasiswa.	% % % % % % % %	100 100 100 100 100 100 100 100	90 0 100 80 100 90 80 80	90.00 0.00 100.00 80.00 100.00 90.00 80.00 80.00	92.50 27.50 92.50 77.50 92.50 92.50 77.50 77.50
Capaian Kinerja Sasaran " BERHASIL"						77.50	78.75
3.	Terciptanya undang-undang dan pelayanan bantuan hukum serta dokumentasi hukum melalui penyusunan produk hukum, sosialisasi produk hukum, dan pengkajian produk perundang-undangan.	1. Prosentase Raperda yang telah di Perdakan 2. Tingkat penyelesaian kasus/ perkara yang ditangani sampai tuntas 3. Tingkat kelengkapan buku dan peraturan perundang-undangan yang didokumentasikan, dipelihara dan dikelola	% % %	100 100 100	100 100 80	100 100 80	92.50 92.50 77.50
Capaian Kinerja Sasaran "SANGAT BERHASIL"						93.33	87.50
4.	Tersusunnya juknis pembinaan dan pelaksanaan operasional bidang perekonomian dan pembangunan untuk kelancaran pembinaan dan proses administrasi bidang perekonomian dan pembangunan	1. Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan perekonomian 2. Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan pembangunan 3. Tingkat pemanfaatan data dan hasil-hasil perekonomian sebagai bahan evaluasi acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya 4. Tingkat pemanfaatan data dan hasil-hasil pembangunan sebagai bahan evaluasi acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya	% % % %	100 100 100 100	100 100 85 85	100 100 85 85	92.50 92.50 77.50 77.50
Capaian Kinerja Sasaran "SANGAT BERHASIL"						92.50	85.00
5	Tersusunnya bahan perumusan kebijakan, pengorganisasian, strategi, pembinaan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan penyelesaian sengketa lelang di Kabupaten Sintang dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah	1. Persentase penyebarluasan bahan SOP dan SPM pengadaan barang / Jasa pemerintah kepada masyarakat. 2. Persentase ketersediaan tenaga ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. 3. Persentase pelaksanaan proses pengadaan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan. 4. Persentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.	% % % %	80 80 80 80	100 30 80 0	125.00 37.50 100.00 0.00	92.50 27.50 92.50 27.50

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)	Capaian Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang.	%	90	90	100.00	92.50
		6. Persentase unit kerja yang telah melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang / jasa pemerintah, pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang.	%	90	90	100.00	92.50
		7. Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil lelang pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitas penyelesaian sengketa.	dok	1	1	100	92.50
		8. Rasio pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitas penyelesaian sengketa.	%	90	90	100.00	92.50
Capaian Kinerja Sasaran "SANGAT BERHASIL"						82.81	76.25
6.	Tersusunnya perumusan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air	1. Jumlah dokumen profil daerah tentang sumber daya alam	dok	1	1	100	92.50
		2. Jumlah dokumen kebijakan daerah di bidang sumber daya alam	dok	1	1	100	92.50
Capaian Kinerja Sasaran "SANGAT BERHASIL"						100.00	92.50
7.	Terlaksananya pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian yang tertib dan lancar, tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan administrasi dan operasional di lingkungan Sekretariat Daerah.	1. Tingkat kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor milik pemerintah.	%	100	95	95	92.50
		2. Tingkat kelayakan sarana dan prasarana gedung kantor milik pemerintah	%	100	90	90	92.50
		3. Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana disetiap Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Sintang.	%	100	90	90	92.50
		4. Tingkat kelayakan sarana dan prasarana bagian di lingkungan Setda Kabupaten Sintang	%	100	90	90	92.50
		5. Tingkat pemenuhan kebutuhan kantor atas barang dan jasa	%	100	90	90	92.50
		6. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesejahteraan pegawai	%	100	90	90	92.50
		7. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan	%	100	95	95	92.50
		8. Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan disiplin.	%	100	90	90	92.50
		9. Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan sanksi pelanggaran disiplin pegawai	%	100	90	90	92.50
		10. Indeks kepuasan pegawai terhadap penghargaan dan prestasi kerja	%	100	80	80	77.50
		11. Tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas pokok Setda dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.	%	100	95	95	92.50
		12. Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan terhadap Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.	%	100	95	95	92.50
Capaian Kinerja Sasaran "BERHASIL"						90.83	91.25
8.	Tersusun dan terselenggaranya kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.	1. Jumlah rancangan Perda dan Perbup SOP dan SOTK Perangkat Daerah	dok	2	2	100	92.50
		2. Jumlah analisis jabatan perangkat daerah yang disusun	dok	1	0	0	27.50
		3. Jumlah standar kompetensi jabatan yang disusun	dok	1	0	0	27.50

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)	Capaian Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Persentase pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik	%	95	90	94.74	92.50
		5. Persentase fasilitasi implementasi ketatalaksanaan	%	85	85	100.00	92.50
		6. Persentase penguatan Sakip	%	100	90	90	92.50
		7. Persentase pembinaan percepatan reformasi birokrasi	%	100	80	80	77.50
Capaian Kinerja Sasaran " BERHASIL "						66.39	71.79
9	Terwujudnya sistem pendokumentasian terpadu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta terwujudnya pelayanan kehumasan dan protokol yang tepat cepat dan akurat.	1. Persentase jumlah informasi atau kegiatan yang seharusnya diliput atau diberitakan	%	98	90	92	92.50
		2. Persentase jumlah informasi dan kegiatan pelayanan dan pembangunan yang telah diinformasikan kepada masyarakat	%	95	90	95	92.50
Capaian Kinerja Sasaran " BERHASIL "						93.29	92.50
10.	Optimalisasi penyusunan program, rencana kerja anggaran dan pelaporan serta pelayanan administrasi keuangan yang lancar.	1. Jumlah laporan keuangan Sekretariat Daerah yang disusun.	%	100	100	100	92.50
		2. Jumlah dokumen rencana kinerja dan anggaran Sekretariat Daerah.	dok	1	1	100	92.50
		3. Jumlah laporan pencapaian kinerja dan anggaran Sekretariat Daerah.	%	100	100	100	92.50
		4. Jumlah laporan semesteran dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah.	%	100	100	100	92.50
		5. Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran Sekretariat Daerah.	dok	2	1	50	27.50
		6. Jumlah laporan keuangan akhir tahun Sekretariat Daerah.	dok	2	2	100	92.50
		7. Tersusunnya dokumen anggaran Sekretariat Daerah.	dok	1	1	100	92.50
		8. Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2017-2021	dok	1	1	100	92.50
		9. Jumlah Surat Keputusan Pendukung	dok	2	2	100	92.50
Capaian Kinerja Sasaran " SANGAT BERHASIL "						94.44	85.28